MENYOAL FILANTROPI : INVESTASI SOSIAL DI TENGAH PANDEMI **PHILANTHROPY: SOCIAL INVESTMENT DURING PANDEMY**

Fitriansyah

Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ABSTRAK

Krisis yang terjadi saat ini sebagai dampak Covid-19 menyebabkan kinerja perekonomian nasional terganggu. Begitu juga sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat mengalami kendala dan hambatan sebagai akibat dari kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat untuk menekan berkembangnya pandemi Covid-19. Pemerintah telah menunjukkan tanggung jawabnya dalam konteks negara kesejahteraan melalui kebijakan perlindungan sosial. Sedangkan berbagai kegiatan filantropi yang dilakukan masyarakat merupakan angin segar bagi ketahanan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19. Berbagai kegiatan filantropi dalam menggalang dana masyarakat dan perusahaan telah banyak dilakukan. Namun sasaran dan tujuan kegiatannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu dimanfaatkan untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan alat kesehatan lainnya serta menyediakan kebutuhan sembako bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Policy Brief ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan filantropi sebagai sebuah kebijakan di tengah pandemic covid-19. Metode penulisan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan dampak covid-19 dan kegiatan filantropi yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan. Menurut penulis sebaiknya kebijakan filantropi yang dilakukan dapat memberikan nilai sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (sustainable programe), yaitu berupa investasi sosial sebagai upaya penjaminan agar tiap-tiap individu punya kemampuan dan kualitas yang diperlukan untuk bekerja, bertahan hidup, dan menjalankan fungsinya sebagai warga negara di masa kini dan mendatang. Program yang dilakukan dapat berupa Pembangunan Masyarakat (community development) dengan sasaran untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dan memberikan aksesibilitas usaha serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Kata Kunci : filantropi, pandemi covid-19, kebijakan perlindungan sosial, investasi sosial

ABSTRACT

The current crisis as a result of Covid-19 has disrupted the performance of the national economy. Likewise, the joints of the socio-economic life of the community experience obstacles and obstacles as a result of policies to limit community activities to suppress the development of the Covid-19 pandemic. The government has demonstrated its responsibility in the context of the welfare state through social protection policies. Meanwhile, various philanthropic activities carried out by the community are a breath of fresh air for the nation's resilience in facing the Covid-19 pandemic. Various philanthropic activities in raising public and corporate funds have been carried out. However, the goals and objectives of these activities are only short-term, namely to be used to provide Personal Protective Equipment (PPE) and other medical equipment needs as well as provide basic food needs for people affected by Covid-19. This Policy Brief aims to analyze and examine the application of philanthropy as a policy in the midst of the Covid-19 pandemic. The writing method is descriptive qualitative, which examines some literature related to the impact of Covid-19 and philanthropic activities carried out by communities and companies. According to the author, the philanthropic policy that is carried out should provide sustainable socio-economic value for society (sustainable program), namely in the form of social investment as an effort to guarantee that each individual has the abilities and qualities needed to work, survive, and carry out their functions as citizens. present and future countries. Programs carried out can be in the form of community development with the aim of creating community economic independence and providing business accessibility and strengthening community social resilience.

Keywords: *philanthropy, covid-19 pandemic, social protection policy, social investing*

A. Pendahuluan

Sejak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) dan telah menyebar pertama kali di Indonesia pada awal Maret 2020, menyebabkan dampak yang begitu luas di berbagai sektor, tidak hanya sektor kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi Covid-19. Penerapan *social distancing* yang diimplementasikan melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), diterapkan pemerintah sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, menimbulkan efek pada sektor ekonomi masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Rindam Nasruddin dan Islamul Haq (2020), kebijakan PSBB membawa dampak dan menuai reaksi yang beragam di masyarakat. Sebagian besar masyarakat tidak dapat bekerja seperti biasa, sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi karena segala kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi dengan baik, khususnya masyarakat kelas bawah.

Secara makro, dampak yang sangat berpengaruh sekali sebagai akibat pembatasan sosial adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan. Padahal capaian kinerja terhadap kedua indikator ini sebelum terjadinya pandemi covid-19, memberikan kontribusi yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Mohamad Ichsan Modjo (2020), pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan proyeksi Bank Dunia diperkirakan hanya berada pada kisaran -3,5% sampai dengan 2,1% pada 2020. Beberapa lembaga juga memperkirakan akan terjadinya penambahan penduduk miskin pada tahun 2020, yaitu berkisar antara 1,16 juta jiwa (+0.44%) hingga 9,6 juta jiwa (+3.6%).

Melihat kondisi ini, tentunya yang paling terdampak sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 ini adalah penduduk miskin, baik yang selama ini masuk dalam kategori penduduk miskin sebanyak 24,8

juta orang maupun penduduk miskin baru sebagai akibat dari Keputusan Hubungan Kerja ataupun sebagai akibat dari hilangnya mata pencaharian dampak dari pembatasan aktifitas sosial masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memberikan perhatian lebih terhadap semakin tingginya penduduk miskin di tengah badai pandemi ini. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam berbagai program dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat lapis bawah selama pandemi. Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (26/9/2020) dalam berita nasional kontan.co.id, kebijakan yang dikeluarkan tersebut berupa program perlindungan sosial, dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 203,9 triliun.

Di samping itu masyarakat juga berperan aktif dalam penanganan dampak Covid-19, baik secara individu maupun secara komunitas dengan cara seperti pembagian sembako, pembagian perlengkapan atau alat-alat kesehatan. Dukungan dan partisipasi masyarakat tersebut yang lumrah dikenal dengan *charity* atau filantropi merupakan wujud kebiasaan masyarakat Indonesia yang telah mengakar dan masih tetap dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imron Hadi Tamin (2011), filantropi sebagai salah satu modal sosial telah menyatu dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar lama khususnya di masyarakat pedesaan.

Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung. Dukungan dan partisipasi masyarakat tersebut dapat menolong kehidupan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebagian besar kegiatan filantropi yang dilaksanakan masyarakat, lembaga sosial ataupun perusahaan selama pandemi berupa pembagian sembako dan penyediaan Alat Pelindung Diri (Hand Sanitizer, Makser, Alat Kesehatan, dll).

Kegiatan seperti ini efektif dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial dalam jangka pendek, artinya bahwa dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat sebagai akibat dari pemberlakuan pembatasan sosial (social distancing). Namun diperlukan strategi yang tepat melalui pelaksanaan kebijakan yang komprehensif untuk menjadikan kegiatan filantropi sebagai investasi sosial jangka panjang dalam rangka mengatasi dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan filantropi yang dilaksanakan perlu dikaji secara teoritis, praktis dan sosial sehingga dapat memberikan multiplier effect dalam arti bahwa kegiatan perlindungan sosial yang dilaksanakan, dapat menggerakkan serta meningkatkan perekonomian dan ketahanan masyarakat.

B. Dampak Covid-19 terhadap Kemiskinan

Resesi ekonomi nampak semakin jelas bagi perekonomian Indonesia selama pandemi covid-19 belum dapat diatasi secara tuntas. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan kembali negatif pada kuartal III 2020, yaitu berada di kisaran 0% sampai minus 2% sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di portal cnnindonesia.com. Senada dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Ekonom INDEF Eko Listyanto (2020) mengatakan dampak resesi sebenarnya sudah terjadi saat ini. Mulai dari kinerja pasar modal yang tidak setinggi kondisi sebelum pandemi covid-19, dunia usaha merugi, tingkat pengangguran meningkat, hingga jumlah orang miskin bertambah. (www.cnnindonesia.com).

Kondisi ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang mengalami masa-masa sulit di tengah pandemi Covid-19. Banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan mata pencahariannya sebagai akibat dari terbatasnya aktivitas masyarakat. Padahal kebijakan Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan untuk menekankan penyebaran pandemi covid-19, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, bahwa “*percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas*. Faktanya bahwa, akhir-akhir ini begitu banyak potret kemiskinan yang terjadi akibat dampak dari Covid-19 yang terus menerjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah. Potret kemiskinan yang terjadi selama mewabahnya virus Corona ini secara faktual dijelaskan oleh Hanni Susanty, S.Pd (2020) dalam laman portal puspensos.kemsos.go.id, antara lain:

1. Warga Banten yang tidak makan selama 2 hari dan akhirnya meninggal dunia.
2. Seorang Bapak asal Batam terpaksa menjual barang yang tersisa berupa ponsel yang rusak demi sesuap nasi, karena tidak ada lagi orang yang mempekerjakannya.
3. Seorang mantan karyawan pabrik sandal di Bogor nekat mencuri tabung gas untuk memberi makan anak dan istri.
4. Serta kasus pencurian beras yang terjadi di Medan, karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan.

Berdasarkan potret kemiskinan tersebut, pangkal persoalannya saat ini bermula dari banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Terlebih lagi mereka yang masuk dalam kategori miskin maupun rentan miskin. Karena pada umumnya masyarakat miskin tidak memiliki faktor produksi seperti tanah dan modal ataupun keterampilan yang cukup sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas (Gunawan Sumodiningrat : 2007). Kondisi ini diperparah lagi dengan terbatasnya akses untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan.

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, dengan pertimbangan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Nanang Ahmad Fauzi dan Sukamdi (2017), yaitu dari berbagai kajian menunjukkan adanya keterkaitan terjadinya bencana dengan peningkatan kemiskinan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ermawati (2011), bahwa pada umumnya kemiskinan yang terjadi setelah bencana disebabkan oleh keterbatasan akses pangan. Hal ini juga dipertegas oleh Kharisma dan Prakoso, (2012), bahwa kemiskinan yang terjadi setelah bencana disebabkan oleh hilangnya aset dan lapangan pekerjaan.

C. Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Dalam konteks Negara kesejahteraan pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Saat ini sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat golongan rendah terganggu kesejahteraannya sebagai akibat pembatasan sosial dalam rangka menekan penyebaran pandemi covid-19. Untuk itu, kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, sebagaimana dijelaskan oleh Agus Saryono (2014) bahwa salah satu tujuan bernegara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sehingga untuk mencapainya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat. Berbagai hal terkait permasalahan yang timbul dalam mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan publik menjadi tantangan tersendiri. Strategi yang tepat dalam menyediakan kebijakan publik

dalam mengatasi masalah-masalah sosial sangat penting untuk dikaji lebih lanjut.

Kebijakan *extraordinary* yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi dampak akibat penyebaran Covid-19 yang begitu massif melalui beberapa regulasi seperti peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden serta peraturan menteri merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih (2016), bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan politis yang diambil pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan publik.

Disamping itu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah mengcover kebutuhan seluruh dunia usaha dan masyarakat baik di bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah hanya berupa dukungan agar pandemi covid-19 tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa untuk masyarakat, tentu tidak bisa seluruhnya shock di absorb oleh APBN. Namun APBN berusaha untuk bisa mendukung ketahanan sosial masyarakat. Dari sisi sosial ekonomi APBN mencoba untuk memberikan dukungan agar shock itu tidak menyebabkan kebangkrutan yang sifatnya massif (<https://www.kemenkeu.go.id>).

D. Filantropi Sebagai alternatif kebijakan

Secara sederhana filantropi seringkali disebut sebagai charity (memberi bantuan). Filantropi juga dapat dikatakan sebagai hibah yang ditujukan untuk investasi sosial. Aktifitas filantropi seharusnya ditujukan kepada kegiatan seperti pendidikan, peningkatan peluang ekonomi masyarakat dalam mengatasi krisis sosial (Andy Agung Prihatna & Kurniawati : 2005).

D.1 Filantropi yang dilaksanakan oleh Individu/ Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

Memberi bantuan atau sumbangan adalah hal yang biasa dilakukan dan merupakan bagian kehidupan bermasyarakat yang tak terpisahkan, bahkan sudah menjadi budaya tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Menyumbang tidak hanya ditujukan untuk kegiatan sosial. Faktor yang paling kuat dalam memberi sumbangan adalah menjalankan kewajiban agama, ikatan kekeluargaan dan persaudaraan. Hal ini dikuatkan dengan Survey PIRAC yang mendapatkan angka 98 persen masyarakat menyatakan pernah memberikan sumbangan. Meskipun sifat sumbangan masyarakat masih bersifat individual yang berorientasi keagamaan dan belum mengarah pada motif investasi sosial (Andy Agung Prihatna dan Kurniawati : 2004). Lebih lanjut dijelaskan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Ipsos MORI di 24 negara pada April 2011, bahwa dorongan agama menjadi penentu dari 24% umat Kristiani, Muslim sebanyak 61%, Buddhis 20% dan Hindu 33%. Bahkan dari 61% Muslim yang berderma, Muslim Indonesia mencapai 91% dengan 83% di bawah usia 35 tahun, Muslim Arab Saudi 71% dan Muslim Turki 33%. Survei tersebut menegaskan bahwa agama sebagai motivator setiap orang dalam melakukan pemberian (*giving*) dan berbagi (*sharing*), baik dalam bentuk waktu, tenaga dan uang (Zaenal Abidin : 2016).

Dalam konteks saat ini, dimana Bangsa Indonesia dihadapkan dengan krisis sebagai dampak covid-19, kita juga banyak mendapatkan kegiatan filantropi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Beberapa lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang mengelola dana zakat,

infaq dan sedekah bagi umat muslim memandang optimis kegiatan filantropi meningkat di tengah wabah Covid-19. Sebagaimana yang diberitakan di [Republika.id](https://www.republika.id), Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta menyampaikan pada Ramadhan tahun ini, Baznas meningkatkan target penghimpunan ZIS sebesar 30% dari tahun lalu. Ketercapaian target ini karena kedermawanan masyarakat meningkat di tengah pandemi. Optimisme yang sama tampak di Rumah Zakat (RZ). CEO RZ Nur Efendi mengatakan, pihaknya menargetkan hingga 1 juta penerima manfaat selama Ramadhan. Pelaksanaan Tugas Direktur Sumber Daya Mobilisasi Dompot Dhuafa, Doni Marlan juga mengungkapkan, pihaknya menargetkan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat hingga Rp 212,3 miliar (<https://www.republika.id>).

Sebagai wujud gotong royong yang melekat pada masyarakat Indonesia, beberapa lembaga/perhimpunan juga melakukan penggalangan dana individu membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Kitabisa.com adalah situs penggalangan dana atau “kotak amal online” bagi masyarakat untuk mendonasikan sebagian rejekinya dalam membantu sesama dengan konsep gotong-royong. Selain itu kesadaran berfilantropi masyarakat di tengah pandemi yang dilakukan oleh lembaga sosial kemasyarakatan melalui Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan, yang diinisiasi oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) agar masyarakat dapat saling membantu, yaitu dengan menghadirkan rak Lumbung Sedekah Pangan, masyarakat dapat memberikan sedekah terbaiknya melalui rak tersebut, sementara yang membutuhkan bisa memanfaatkan apa yang terletak di sana. (<https://news.act.id>).

D.2 Filantropi yang dilakukan oleh Perusahaan.

Potensi berikutnya adalah aktifitas filantropi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Fenomena kegairahan perusahaan dalam memberikan sumbangan sosial menunjukkan tanda positif, meskipun krisis ekonomi melanda Indonesia sejak 1998, sejumlah perusahaan masih berkeinginan untuk memberikan sumbangan kepada kegiatan sosial (Andy Agung Prihatna & Kurniawati : 2005). Lebih lanjut dijelaskan bahwa potensi ini dikuatkan dengan regulasi yang mengatur kontribusi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya untuk program pembangunan sosial, minimal 2,5% dari keuntungan laba perusahaan sebagaimana ketentuan dalam UU No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. (Zaenal Abidin : 2016).

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang menaungi kelompok pengusaha sudah mengumpulkan dana senilai Rp 300 miliar, serta telah membantu 5.000 alat uji cepat atau test kit, 2.000 alat pelindung diri atau APD, masker, ventilator untuk menangani wabah covid-19. Adapun perusahaan yang telah berkomitmen dalam memberi sumbangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut adalah Ciputra Group, First Resources Ltd., Mulia, dan Wilmar Internationa. PT Djarum, Agung Sedayu Group, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Puradelta Lestari Tbk, dan Triputra Group. Astra International, Panin Group, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., Wings Corporation. Rajawali Corporation, Garudafood, Nutrifood Indonesia, beserta FKS Group, PT Pan Brothers Tbk., PT Sritex Tbk., dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (<http://bisnitempo.co.id>)

Selain itu media massa juga berkontribusi langsung terhadap penggalangan dana masyarakat dan perusahaan serta menyalurkan dana CSR untuk mengatasi krisis pandemi di tengah masyarakat. Seperti “Yayasan Peduli Kasih” SCTV dan Indosiar, “Dompot Kemanusiaan” Media Group, “Dompot Amal” Trans Media. Dana yang diperoleh tersebut dibelikan untuk Alat Pelindung Diri atau APD, masker, sembako, makanan siap santap yang didistribusikan langsung ke masyarakat, rumah sakit, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang menjadi *leading sector* penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia”.

Potensi sumber dana masyarakat dan perusahaan selama pandemi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Kontribusi Filantropi Covid-19

Lembaga/ Kegiatan Filantropi	Dana Zakat/ Penerima Manfaat	Sumbangan Sosial
Baznas	4 Triliun	-
Rumah Zakat	1 juta Penerima Manfaat	-
Dompot Dhuafa	212,3 Miliar	-
Kitabisa.com	-	130 miliar
Yayasan Peduli Kasih SCTV	-	9 miliar
Dompot Kemanusiaan Metro TV	-	12 miliar
Dompot Amal Trans Media	-	1,3 miliar
KADIN	-	300 milyar

Sumber data : situs republika.id, covid-19.go.id dan dewanpers.or.id

Melihat kondisi ini, filantropi dapat menjadi potensi yang besar dalam penggalangan dana masyarakat sebagai bentuk partisipasi sosial masyarakat dalam menghadapi krisis. Kegiatan filantropi tersebut juga dapat meringankan beban pemerintah yang begitu besar dalam menangani dampak covid-19 yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kondisi fiskal negara menjadi tidak sehat. Dr. TB. Ace Hasan Syadzily selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI (2020) menilai filantropi menjadi modal sosial yang paling bisa diandalkan masyarakat serta merupakan angin segar bagi ketahanan Bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19 (<https://news.act.id>).

Peluang dan potensi filantropi ini dapat dijadikan alternatif kebijakan dalam penanganan dampak covid-19 dikala negara dalam keadaan resesi ekonomi. Namun sebaiknya kebijakan filantropi yang dilakukan dapat memberikan nilai sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (*sustainable progame*), yaitu berupa investasi sosial. Program dan kegiatan filantropi yang dilakukan hendaknya memperoleh tujuan dan hasil penanganan yang berdampak sosial ekonomi secara jangka panjang, yaitu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dan memberikan aksesibilitas usaha serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat, sehingga dapat meringankan beban pengeluaran pemerintah untuk program perlindungan sosial. Kebijakan yang baik tentunya harus mempertimbangkan etika kebijakan. Pentingnya menerapkan etika kebijakan dalam melandasi pengambilan kebijakan, yaitu agar terciptanya prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Etika kebijakan publik merupakan standart nilai yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun pemerintah dalam mengambil suatu tindakan, berkaitan mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan (William N.Dunn : 2003). Prinsip yang mendasari etika kebijakan

tersebut dapat dipertimbangkan untuk menerapkan kebijakan filantropi melalui pendekatan investasi sosial. Taylor-Gooby (2000) menekankan pentingnya investasi sosial karena peran negara (c.q. pemerintah) dalam mewujudkan kesejahteraan hanya dapat dilakukan melalui pembiayaan-pembiayaan sosial berbentuk investasi pada sumber daya manusia dan perluasan peluang-peluang bagi setiap anggota masyarakat, disaat tidak mungkin lagi tercapai kondisi tersedianya lapangan kerja yang memadai, redistribusi pendapatan yang adil, dan semakin mahal biaya pelayanan publik. (Pascarina : 2007).

E. Rekomendasi Kebijakan

Kondisi krisis yang dialami bangsa Indonesia, baik krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 serta krisis yang saat ini sebagai dampak pandemi Covid-19, memberi pelajaran yang berharga betapa pentingnya peran perlindungan sosial sebagai penstabilan ekonomi yang terpadu dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Sistem perlindungan sosial yang kuat membutuhkan dukungan dana yang signifikan guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara komprehensif. Buku yang berjudul *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* (Leiden-Boston: Brill, 2013) menjelaskan di mana saat pemerintah lemah, maka filantropi menguat, begitu pun sebaliknya. (<http://gusdurian.net>).

Oleh sebab itu mengingat potensi dan sumber dana masyarakat yang begitu besar melalui kegiatan filantropi, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebuah kebijakan dalam mengatasi krisis yang terjadi. Filantropi dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan, karena filantropi merupakan modal sosial dalam masyarakat yang berpotensi menumbuhkan produktifitas masyarakat.

Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti gotong-royong,

kepercayaan, kohesifitas, altruisme, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan ekonomi, melalui beragam mekanisme, seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan public (Blakeley dan Suggate, 1997; Suharto, 2005a; Suharto, 2005b). Dalam konteks kebijakan public modal sosial pada intinya menunjukkan *political will* dan penciptaan jaringan-jaringan, kepercayaan, nilai-nilai bersama, norma-norma dan kebersamaan yang timbul dari adanya interaksi manusia dalam masyarakat. (<http://www.policy.hu>).

Kebijakan filantropi yang dilaksanakan hendaknya mengarah pada investasi sosial, yang mampu memberikan penguatan masyarakat dan sekaligus sebagai modal sosial dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mandiri secara sosial dan ekonomi. Caroline Pascarina (2007) menjelaskan Investasi sosial harus difokuskan pada upaya penjaminan agar tiap-tiap individu punya kemampuan dan kualitas yang diperlukan untuk bekerja, bertahan hidup, dan menjalankan fungsinya sebagai warga negara di masa kini dan mendatang, seperti life skill education, program peningkatan keterampilan, riset, teknologi, pemeliharaan anak-anak dan pemberdayaan komunitas sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1. Filantropi yang bersumber dari dana zakat perlu dimaknai sebagai kewajiban ekonomi yang wajib dipenuhi oleh umat muslim yang dibayarkan setiap tahun. Dari sisi normatif atau teologis, zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Pemanfaatan dana zakat dapat digunakan untuk kegiatan yang produktif dan mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Misalnya modal usaha untuk membuat kue/panganan, berternak atau meningkatkan keterampilan menjahit, dll. Dalam

penerapannya kegiatan seperti ini diperlukan pendampingan dari tenaga ahli. Diperlukan regulasi dari pemerintah (Peraturan Daerah) dalam menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha bagi masyarakat yang membutuhkan.

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan benar-benar diterapkan dan dikelola secara terpadu dan selaras dengan kebijakan pemerintah, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Menurut Weeden (1994) korporasi atau perusahaan harus mengubah kebijakan melakukan filantropi sebagai *corporate social responsibility* menjadi kebijakan *corporate social investing* (Puspensos : 2005). Perusahaan harus mampu untuk menyeleksi berbagai sasaran dan program filantropi yang patut memperoleh dana dari kebijakan *corporate social investing*. Salah satu program yang secara efektif dapat dilihat sebagai investasi sosial adalah pembangunan masyarakat (*community development*). Bentuk-bentuk program pembangunan masyarakat dapat berupa Program Pemerdayaan Ekonomi Masyarakat seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pemberdayaan UKM, Industri Rumah Tangga, BUMDes, Kelompok Tani. Program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Program Pembangunan Masyarakat lainnya dapat berupa program peningkatan kualitas pendidikan seperti Beasiswa bagi masyarakat miskin, Pelatihan bagi guru dan tenaga pengajar serta dapat juga berupa program rehabilitasi rumah tidak layak huni.
3. Program filantropi investasi sosial ini harus dikolaborasi dengan kebijakan pemerintah dengan mengaktifkan dan memberdayakan forum *Corporate Social Responsibility* (Forum CSR)

melalui proses perencanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan Sumodiningrat (2007). *Pemberdayaan Sosial : Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta : Buku Kompas.
- Andy Agung Prihatna & Kurniawati (2005). *Peduli dan Berbagi : Pola Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Berderma*. Jakarta :Piramedia.
- William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Puspensos, 2005, *Investasi Sosial*, Jakarta, LaTofi Enterprise.

Jurnal

- Rindam Nasruddin dan Islamul Haq (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol 7 No. 7 (2020)*. ISSN : 2654-9050. Jakarta : FSH UIN Syarif Hidayatullah.
- Mohamad Ikhsan Modjo (2020): Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan : The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 – Juni 2020*. ISSN : 2654-2625. Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas.
- Imron Hadi Tamin (2011). Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal. *Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1, No.1, April 2011*. ISSN: 2089-0192. Surabaya : Fisip Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Nanang Ahmad Fauzi dan Sukamdi (2017). Analisis Kemiskinan di Wilayah Bencana Banjir Rob Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung

Kabupaten Demak. *Jurnal Bumi Indonesia*. Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017. Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.

- Agus Suryono (2014). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Volume VI, Nomor 02, September 2014. ISSN 2085-1162
- Dian Fitri Afifah & Neneng Yani Yuningsih (2016). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Tarfficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. *CosmoGov : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.2, No. 2 (2016)*. ISSN 2442-5958. E-ISSN 2540-8674. Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Zaenal Abidin (2016). Paradoks Dan Sinjutas (Sinergi- Keberlanjutan-Ketuntasan) Gerakan Filantropi Di Indonesia. *Share : Social Work Jurnal*. Volume 6 Nomor 2 (2016). ISSN : 2339-0042 (p) ISSN : 2528-1557 (e). Bandung : Universitas Padjadjaran.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). 31 Maret 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6487 Jakarta.

Website

- Nasional.contan.co.id. Jokowi menyebut program perlindungan sosial sudah berjalan baik, ini rinciannya. 26 September 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyebut-program-perlindungan-sosial-sudah-berjalan-baik-ini-rinciannya>. Akses 13 Oktober 2020.

- News.act.id. Upaya Solidaritas dan Filantropi Tekan Dampak Pandemi. 18 Agustus 2020.
<https://news.act.id/berita/upaya-solidaritas-dan-filantropi-tekan-dampak-pandemi>. Akses 19 Oktober 2020.
- Cnnindonesia.com. Dampak Resesi Corona Mengalir Ke Berbagai Sektor. 9 September 2020.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200908105412-532-543899/dampak-resesi-corona-mengalir-ke-berbagai-sektor>. Akses 6 Oktober 2020.
- Puspensos.kemensos.go.id. Potret Kemiskinan di Tengah Pandemi Covid-19.
<https://puspensos.kemensos.go.id/potret-kemiskinan-di-tengah-pandemi-covid-19>. Akses 26 Oktober 2020.
- Republika.id. Filantropi Optimistis di Tengah Pandemi Covid-19. 27 Oktober 2020.
<https://www.republika.id/posts/6178/filantropi-optimistis-di-tengah-pandemi-covid-19>. Akses 28 Oktober 2020.
- Bbc.com. Rajin Berdonasi, Indonesia Negara Paling Dermawan Sedunia. 5 Nopember 2018.
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46088754>. Akses 28 Oktober 2020.
- Kemenkeu.go.id. Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi. 17 April 2020. Indonesia
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia>. Akses 28 Oktober 2020.
- <https://covid19.go.id/p/berita/ceo-kitabisacom-dana-rp-130-miliar-terkumpul-untuk-bantu-sesama-selama-pandemi-covid-19>. Akses 6 Nopember 2020
- https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/175/Filantropi_Media_Saat_Pandemi_Covid-19. Akses 6 Nopember 2020
- <https://bisnis.tempo.co/read/1323329/pengusaha-kumpulkan-bantuan-rp-500m-untuk-penanganan-corona>. Akses 6 Nopember 2020
- http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/20080225_104150.pdf. Akses 6 Nopember 2020
- <https://gusdurian.net/potret-filantropi-di-tengah-pandemi-covid-19>. Akses 6 Nopember 2020.
- http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/MODAL_SOSIAL_DAN_KEBIJAKAN_SOSIA.pdf. Akses 6 Nopember 2020.